



LAPORAN AKTUALISASI

EDUKASI DAMPAK NEGATIF KENDARAAN BERMOTOR OVER DIMENSI OVER LOAD (ODOL) PADA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM

Oleh :

**DENDY PRATAMA, A.Ma.PKB
NDH : 37**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II ANGKATAN IV
PALEMBANG
TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN AKTUALISASI

EDUKASI DAMPAK NEGATIF

KENDARAAN BERMOTOR OVER DIMENSI OVER LOAD (ODOL)

PADA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS

PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM

Oleh :

DENDY PRATAMA, A.Ma.PKB

NDH : 37

Telah diseminarkan dan disetujui pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 7 Mei 2021

Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

COACH,

MENTOR,

**Ir. Hj. Nuraini Arsianty, M.Si.
Pembina Utama (IV.e)
NIP. 195906061985032002**

**Fitri Yanto, S.IP
Penata (III.c)
NIP. 198506202011011005**

Diketahui/disetujui oleh:

**Kepala Bidang Pk Manajerial
BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan**

**Drs. A. GUFRAN, M.Si
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 196904241994031004**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI**

**EDUKASI DAMPAK NEGATIF
KENDARAAN BERMOTOR OVER DIMENSI OVER LOAD (ODOL)
PADA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PAGAR ALAM**

Oleh :

**DENDY PRATAMA, A.Ma.PKB
NDH : 37**

Telah diseminarkan dan disetujui pada:

Hari/Tanggal : Jum'at / 7 Mei 2021

Tempat : BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

COACH,

PENGUJI,

**Ir. Hj. Nuraini Arsianty, M.Si.
Pembina Utama (IV.e)
NIP. 195906061985032002**

**Rezha Dwi Sahara, S.IP
Penata (III.c)
NIP. 1991030720101001**

Disetujui dan Disahkan oleh:

**Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,**

**Hj. Tarbiyah, S.Pd., MM
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 196410131984062001**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Segenap ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan Rancangan Aktualisasi ini, penulis sampaikan pada :

1. Ibu Hj. Tarbiyah, S.Pd., M.M selaku Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bapak Drs. Ahmad Gufran, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bapak Novri Endri, ST., M.M selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
4. Bapak Ir. Hj. Nuraini Arsianty, M.Si selaku *Coach* yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan sehingga rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Fitri Yanto, S.IP selaku mentor yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan sehingga laporan aktualisasi habituasi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Widyaishwara yang telah memberikan materi dengan tulus dan semangat selama pendidikan dan pelatihan.
7. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan terbaik.
8. Rekan-rekan peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan IV yang kompak dan aktif selama pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS ini.

Penulis menyadari bahwa rancangan aktualisasi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan agar rancangan aktualisasi ini jauh lebih baik. Semoga laporan rancangan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Palembang, Mei 2021
Penulis,

DENDY PRATAMA, A.Ma.PKB
NDH : 37

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat	3
C. Ruang Lingkup	3
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI	4
A. Profil Organisasi.....	4
B. Visi, Misi	4
C. Struktur Organisasi	5
D. Tugas Pokok.....	6
E. Deskripsi Isu.....	9
F. Analisis Isu	10
G. Argumentasi <i>Core Issue</i> Terpilih	11
H. Nilai-nilai Dasar Profesi PNS.....	12
I. Matriks Rancangan.....	27
J. Jadwal Kegiatan	35
BAB III PELAKSANAAN AKTUALISASI	36
A. Pendalaman Core Isu Terpilih	36
B. Capaian Kegiatan Aktualisasi	36
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identifikasi <i>Core Issue</i>	10
Tabel 2. Matriks Aktualisasi	27
Tabel 3. Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	35
Tabel 4. Ringkasan Hasil Aktualisasi.....	37
Tabel 5. Kegiatan 1.....	38
Tabel 6. Kegiatan 2.....	39
Tabel 7. Kegiatan 3.....	41
Tabel 8. Kegiatan 4.....	43
Tabel 9. Kegiatan 5.....	45
Tabel 10. Kegiatan 6.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	4
Gambar 2. Struktur Organisasi	5
Gambar 3. Konsultasi dengan mentor.....	39
Gambar 4. Membuat Design Leaflet.....	40
Gambar 5. Membuat Design Banner.....	42
Gambar 6. Melakukan Edukasi ODOL dan Pengisian Kuisione.....	43
Gambar 7. Melakukan Pengukuran Dimensi	46
Gambar 8. Melakukan Evaluasi.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga untuk mengatur transportasi dilingkup nasional dengan nama lembaga tersebut adalah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Transportasi sendiri terdapat tiga (3) matra meliputi: matra darat, matra laut dan matra udara. Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu cara untuk menjamin persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan yang beroperasi di jalan. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya secara tepat waktu dan berkala pada Unit Pelaksa Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor .

Untuk menjamin terpenuhnya persyaratan tersebut, maka dilaksanakan suatu sistem yang mengatur dalam proses pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 49, bahwa :

- 1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan / atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.

Adapun maksud pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan;
- 2) Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaraan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan di jalan;

3) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pada saat ini penulis ditempatkan pada Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam. Selama bekerja, penulis menemukan permasalahan yaitu banyak nya kendaraan angkutan barang bak terbuka yang dimensinya melebihi standar yang telah ditentukan. Contohnya kendaraan angkutan barang yang beroperasi melebihi muatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis memilih gagasan pemecahan masalah, yaitu **“Edukasi Dampak Negatif Kendaraan Bermotor Over Dimensi Over Load (ODOL) Kepada Pemilik Kendaraan Di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pagar Alam.”**

Solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah mengaktualisasi nilai – nilai dasar dalam aktualisasi yang di laksanakan pada Unit Pelaksa Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam sebagai tempat edukasi Pengujian Kendaraan Bermotor kepada pemilik kendaraan wajib uji.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Dengan adanya edukasi dan sosialisasi tentang dampak *negatif* yang ditimbulkan oleh kendaraan *over dimensi over load* (ODOL) maka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas.

2. Manfaat

Bagi Instansi (UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam) Laporan aktualisasi ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan inovasi serta mutu pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

Bagi masyarakat dengan adanya edukasi dan sosialisasi tentang dampak negatif kendaraan *over dimensi* dan *over load* (ODOL) dapat mengurangi angka kecelakaan kendaraan bermotor.

Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Mampu memahami, menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yang meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. mampu menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa yang memiliki integritas dan profesional di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Aktualisasi ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam, khususnya di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pemberian edukasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor *over dimensi over load* (ODOL) melalui *leaflet*, *banner* dan sosialisasi secara langsung kepada pemilik kendaraan bermotor.

BAB II

LAPORAN AKTUALISASI

A. Profil Organisasi



Gambar 1. Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam

Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam berada di Selibar, Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.

B. Visi dan Misi

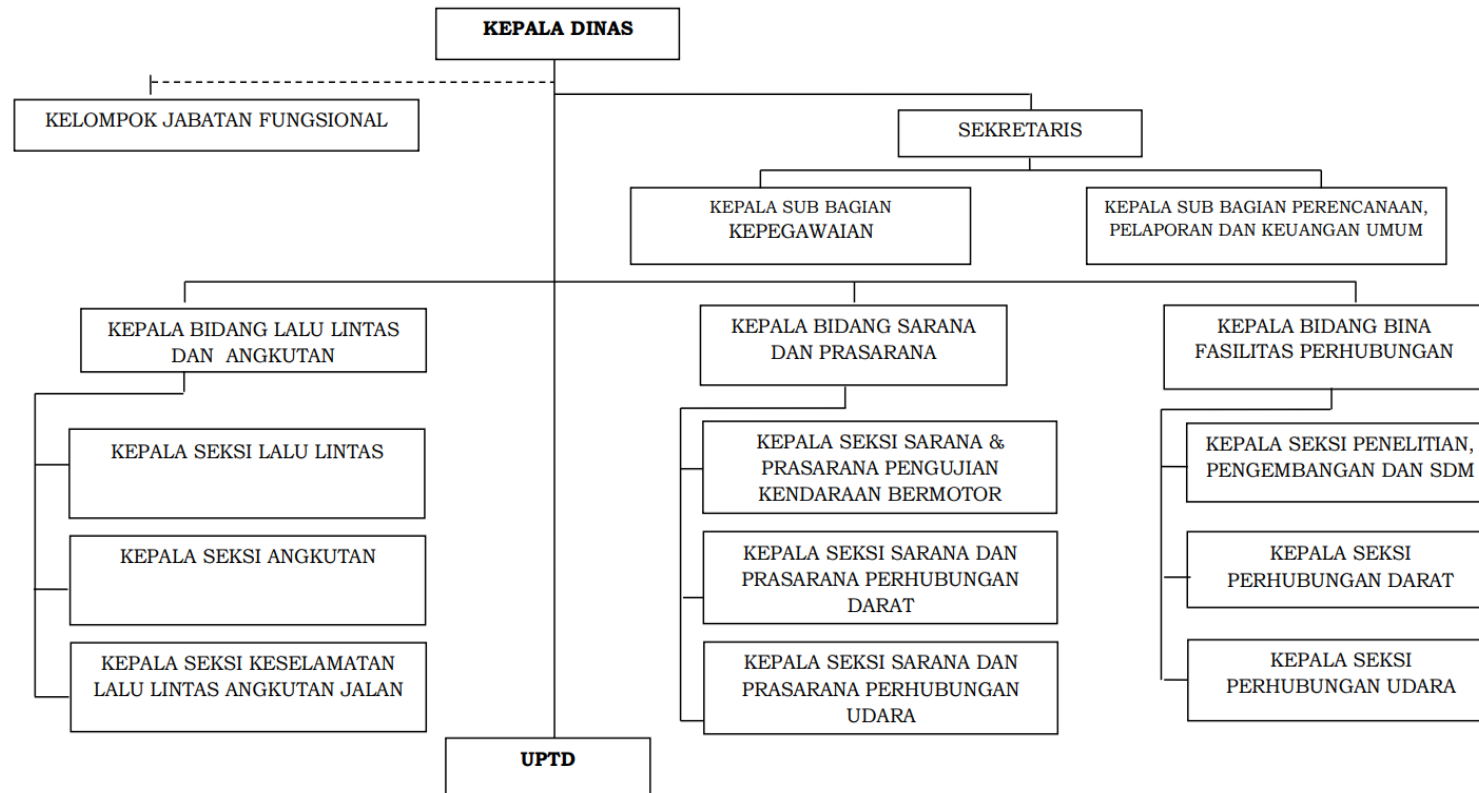
1. Visi:

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal dan Berkelanjutan dalam Menunjang Visi Kota Pagar Alam”

2. Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur perhubungan.
- 2) Memantapkan system dan tata kelola perhubungan.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan.

C. Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi

D. Tugas Pokok

1. Tugas Unit Kerja

Tugas UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan walikota Pagar Alam No 16 tahun 2017 pasal 19 adalah :

- a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor di wilayah kota pagar alam;
- c. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. Pemeberian petunjuk-petunjuk teknis tentang ketentuan persyaratan kendaraan wajib uji dan penetapan daya angkut kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan teknis kepada perusahaan karoseri dan perbegkelan kendaraan bermotor;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Penguji pelaksana

Tugas penguji pelaksana menurut Peraturan Perhubungan Nomor 156 Pasal 11 adalah:

- 1) Memeriksa visual nomor dan kondisi rangka mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 2) Memeriksa visual kesesuaian nomor uji dan kondisi tipe motor penggerak mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 3) Memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 4) Memeriksa visual kondisi sistem konverter kit bagi mobil barang tunggal selain mobil tangki yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;

- 5) Memeriksa visual kondisi dan mengukur posisi pipa pembuangan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 6) Memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 7) Memeriksa visual kondisi sistem suspensi mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 8) Memeriksa visual kondisi sistem rem utama mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 9) Memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 10) Memeriksa visual kondisi panel instrument pada dashboard mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 11) Memeriksa visual kondisi kaca spion mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 12) Memeriksa visual kondisi spakbor mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 13) Memeriksa visual bentuk bumper mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 14) Memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 15) Memeriksa visual rancangan teknis mobil barang tunggal selain mobil tangki sesuai dengan peruntukannya;
- 16) Memeriksa visual kondisi badan mobil barang tunggal selain mobil tangki, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, dan pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup;
- 17) Memeriksa manual kondisi penerus daya mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 18) Memeriksa manual sudut bebas kemudi mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 19) Memeriksa manual kondisi rem parkir mobil barang tunggal selain mobil tangki;

- 20) Memeriksa manual fungsi lampu dan alat pamantul cahaya mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 21) Memeriksa manual fungsi penghapus kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 22) Memeriksa manual tingkat kegelapan kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 23) Memeriksa manual fungsi klakson mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 24) Memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 25) Memeriksa manual ukuran mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 26) Memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 27) Memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
- 28) Menguji kepekatan asap gas buang (smoke) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 29) Menguji emisi gas buang (CO-HC) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 30) Menguji alat penunjuk kecepatan (speedometer) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 31) Menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (noise) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 32) Menguji kincup roda depan (side slip) mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 33) Menguji rem utama mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 34) Menguji rem parkir mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 35) Menguji lampu utama (head light) jauh mobil barang tunggal selain mobil tangki;

- 36) Menguji lampu utama (head light) dekat mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 37) Mengukur kedalaman alur ban mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 38) Mengukur berat mobil barang tunggal selain mobil tangki;
- 39) Mengukur dimensi utama mobil barang tunggal selain mobil tangki; dan/atau
- 40) Mengukur tembus cahaya pada kaca mobil barang tunggal selain mobil tangki.

E. Deskripsi Isu

Pengertian isu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin, dan desas desus. Menurut Regester dan Larkin (2005) sebuah isu yang timbul ke permukaan adalah suatu kondisi atau peristiwa, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang jika dibiarkan akan menjadi efek yang signifikan pada fungsi atau kinerja organisasi tersebut atau pada target-target organisasi tersebut dimasa mendatang.

Sesuai dengan sasaran pelaksanaan aktualisasi ini, maka isu yang akan diangkat terkait dengan agenda ketiga yaitu Kedudukan dan Peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan *Whole Of Government*). Adapun dari identifikasi masalah yang terjadi di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar alam, penulis menetapkan beberapa isu yang menjadi topik, yaitu:

- 1. Kurangnya edukasi tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor *over dimensi over load* (ODOL);
- 2. Kurang optimalnya tata cara pendaftaran pengujian kendaraan bermotor untuk uji berkala;
- 3. Belum adanya jadwal untuk perawatan alat uji mekanik.

F. Analisis Isu

Pembuatan laporan aktualisasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di tempat tugas terkait peranannya sebagai ASN dalam hal manajemen ASN, *Whole of Government* dan pelayanan publik serta dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN. Dalam proses penetapan isu yang berkualitas diperlukan suatu alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas yaitu menggunakan Kriteria Analisis USG dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) dari mulai yang sangat USG (skor 5) sampai tidak sangat USG (skor 1).

1. **Urgency** ialah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.
2. **Seriousness** ialah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan.
3. **Growth** ialah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Berikut adalah hasil analisis isu-isu yang sudah dianalisis menggunakan instrument USG :

Tabel 1. Identifikasi *Core Issue*

No.	Masalah-masalah yang Teridentifikasi	Urgency (1-5)	Seriousness (1-5)	Growth (1-5)	Σ (Jumlah)	Rank
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kurangnya edukasi tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor <i>over dimensi over load</i> (ODOL)	4	4	5	13	1
2.	Kurang optimalnya tata cara pendaftaran pengujian kendaraan	3	3	4	10	2

	bermotor untuk uji berkala					
3.	Belum adanya jadwal untuk perawatan alat uji mekanik.	3	3	3	9	3

Keterangan :

5 : Sangat Bermasalah

4 : Bermasalah

3 : Cukup Bermasalah

2 : Kurang Bermasalah

1 : Tidak Bermasalah

Berdasarkan kriteria Matriks USG yang telah dilakukan, dapat diambil suatu prioritas masalah yang dapat diangkat sebagai *Core Issue* yaitu **"Kurangnya Edukasi Tentang Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Oleh Kendaraan Bermotor *Over Dimensi Over Load* (ODOL)"**.

G. Argumentasi *Core Issue* Terpilih

Peraturan yang baik diperlukan partisipasi dan dukungan dari pemberi pelayanan dan pengguna layanan, Salah satunya dengan adanya pemberian edukasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor angkutan barang yang *over dimensi dan over load*. Bisa melalui leaflet, banner dan sosialisasi secara langsung kepada pemilik kendaraan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ketertiban berlalulintas di jalan. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu bahwa penyelenggaraan yang baik dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, prasarana dan sarana yang memadai serta adanya dukungan pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu

indikator untuk menuju *good governance*. keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga sangat tergantung dari kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

H. Nilai-nilai Dasar Profesi PNS

1. Nilai Nilai Aneka

Berdasarkan dari kelima nilai dasar ANEKA yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu dan Anti korupsi yang harus di tanamkan kepada setiap ASN maka perlu di ketahui indikator-indikator dari kelima kata tersebut yaitu:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab, yang pada dasarnya memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Nilai-nilai dasar akuntabilitas meliputi:

- 1) Kepemimpinan,
- 2) Transparansi,
- 3) Integritas,
- 4) Tanggung jawab (responsibilitas),
- 5) Keadilan,
- 6) Kepercayaan,
- 7) Kesimbangan,
- 8) Kejelasan,
- 9) Konsisten.

b. Nasionalisme

Makna Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita – cita dan pendorong bagi bangsanya, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk

membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai – nilai Pancasila.

Adapun nilai-nilai dasar dari nasionalisme adalah:

- 1) Implementasi nilai-nilai pancasila
- 2) ASN sebagai pelaksana kebijakan publik
 - Berintegritas tinggi
 - Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.
 - Mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas.
 - Mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.
- 3) ASN sebagai pelayan publik
 - Profesional
 - Memenuhi hak-hak pelanggan
 - Berintegritas tinggi
- 4) ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa
 - Pemersatu bangsa (Dilandasi nilai-nilai semangat sumpah pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika)
 - Menjaga kondisi damai

c. Etika Publik

Etika merupakan refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Nilai – nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang ASN yakni sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh nilai – nilai dalam ideologi negara Pancasila.
- 2) Setia dan mempertahankan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 3) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- 4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
- 5) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
- 6) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
- 7) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- 8) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- 9) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- 10) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- 11) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
- 12) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- 13) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
- 14) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

d. Komitmen Mutu

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, secara keseluruhan mencerminkan perlunya komitmen mutu dari setiap aparatur dalam memberikan layanan, apapun bidang layanannya dan kepada siapapun layanan itu diberikan, target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan (*customer satisfaction*).

Nilai- nilai dasar yang terkandung dalam Komitmen Mutu:

- 1) Efektif dan efisien
- 2) Inovasi
- 3) Mengedepankan komitmen terhadap konsumen atau klien
- 4) Memberi layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar konsumen atau klien tetap setia

e. Anti Korupsi

Anti korupsi merupakan tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi antara lain:

- 1) Kejujuran,
- 2) Kepedulian,
- 3) Kedisiplinan,
- 4) Kemandirian,
- 5) Tanggung jawab,
- 6) Kerja keras,
- 7) Kesederhanaan,
- 8) Keberanian,
- 9) Keadilan.

2. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

a. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga

diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

➤ Kedudukan ASN

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas.

- 1) Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- 2) Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya . oleh karena itu, dalam pembinaan karir pegawai ASN, khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karir tertinggi.
- 3) Kedudukan ASN berada di pusat, daerah dan luar negeri, namun demikian pegawai ASN merupakan kesatuan. Kesatuan bagi pegawai ASN sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadinya isu putra daerah yang hampir terjadi dimana-mana

sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa.

➤ Peran ASN

Untuk menjalankan kedudukan pegawai ASN, maka pegawai ASN berfungsi dan bertugas sebagai berikut :

1) Pelaksana kebijakan publik

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

2) Pelayan publik

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan.

3) Perekat dan pemersatu bangsa

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan

manajemen ASN, salah satu di antaranya asas persatuan dan kesatuan.

➤ Hak dan Kewajiban ASN

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejateraan ASN dan akuntabel, maka setiap SN diberikan hak. Hak ASN dan PPPK yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai berikut:

PNS berhak memperoleh:

- 1) Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- 2) Cuti;
- 3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- 4) Perlindungan; dan
- 5) Pengembangan kompetensi.

Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92 pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa:

- 1) Jaminan kesehatan;
- 2) Jaminan kecelakaan kerja;
- 3) Jaminan kematian;
- 4) Bantuan hukum.

Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah suatu yang sepatutnya diberikan. Pegawai ASN berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN wajib:

- 1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- 2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- 4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- 6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- 7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

➤ Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN.

- 1) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- 2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- 3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- 4) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

- 6) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan;
- 7) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- 8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- 9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- 10) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- 11) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- 12) Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

b. Whole of Government

Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup organisasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik.

Dalam laporan APSC menyebutkan bahwa WoG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa

WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah, di antaranya :

- 1) Adanya faktor-faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
- 2) Adanya faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan.
- 3) Keberagaman bangsa Indonesia, seperti latar belakang nilai, budaya adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa.

Beberapa nilai dasar yang terkandung dalam *Whole of Government* (WoG) antara lain sebagai berikut :

1) Koordinasi

Kompleksitas lembaga membutuhkan koordinasi yang efektif dan efisien antar lembaga dalam menjalankan kegiatan kelembagaan.

2) Integrasi

Integrasi dilakukan dengan pembauran sebuah sistem antar lembaga sehingga menjadi kesatuan yang utuh.

3) Sinkronisasi

Sinkronisasi merupakan penyelarasan semua kegiatan/data yang berasal dari berbagai sumber , dengan menyingkronkan seluruh sumber tersebut.

4) Simplifikasi

Simplifikasi merupakan penyederhanaan segala sesuatu baik terkait data/proses di suatu lembaga untuk mengefisienkan waktu, tenaga dan biaya.

c. Pelayanan Publik

1) Pengertian pelayanan publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara : 1998). Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa : pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan.

Sedangkan definisi saat ini yang menjadi rujukan utama dalam utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan (pelanggan) dan kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

2) Jenis barang/jasa

Menurut para ahli, barang atau jasa terbagi menjadi 4 jenis, yaitu :

- a) Barang/jasa publik, yaitu barang/jasa yang memiliki *rivalry* (rivalitas) dan *excludability* (ekskludabilitas) yang rendah.
- b) Barang/jasa privat, yaitu barang/jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat ekskludabilitas dan rivalitas yang tinggi.

- c) Barang/jasa semi privat, yaitu barang/jasa yang memiliki karakter tingkat ekskludabilitas tinggi tetapi rivalitasnya rendah.
- d) Barang/jasa semi publik, yaitu barang/jasa yang ekskludabilitasnya rendah namun rivalitasnya tinggi.

3) Prinsip-prinsip pelayanan publik

Sebagai seorang ASN yang baik, kita perlu mengetahui bahwa pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi. prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima, antara lain :

- a) Partisipatis, yaitu adanya keterlibatan atau peran dari masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelayanan publik.
- b) Transparan, yaitu adanya akses yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan, seperti : persyaratan, prosedur, biaya dan sejenisnya.
- c) Responsif, yaitu pemerintah mendengar dan memenuhi tuntutan warga negaranya untuk memberikan pelayanan publik yang baik.
- d) Tidak diskriminatif, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti : status sosial, pandangan politik, etnis, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel dan sejenisnya.

- e) Mudah dan murah. mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah dipenuhi, sedangkan murah artinya biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan terjangkau oleh seluruh warga negara.
- f) Efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit dan biaya yang murah.
- g) Aksesibilitas, yaitu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.
- h) Akuntabel, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat baik kepada atasan maupun kepada masyarakat luas
- i) Berkeadilan, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.

Disamping itu, sebagai seorang ASN kita juga harus memahami berbagai hal yang menjadi fundamental pelayanan publik. berikut ini yang merupakan fundamental pelayanan publik adalah :

- a) Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi.

- b) Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara.
- c) Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang.
- d) Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara (proteksi).

Sistem birokrasi diharapkan mampu mengelola urusan publik dengan efektif dan efisien dibandingkan dengan bentuk organisasi yang ada sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa masalah (problem) yang menjerat sistem birokrasi yang ada sebagai patologi birokrasi. bentuk-bentuk patologi birokrasi tersebut, antara lain:

- a) Penggelembungan organisasi
- b) Duplikasi tugas dan fungsi.
- c) Red tape, yaitu cara kerja birokrasi yang prosedural, lamban dan berbelit-belit.
- d) Konflik kewenangan
- e) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan Enggan untuk melakukan perubahan.

I. Matrik Rancangan

Unit Kerja : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pagar Alam.

Identifikasi Isu :

1. Kurangnya edukasi tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor *over dimensi over load* (ODOL);
2. Kurang optimalnya tata cara pendaftaran pengujian kendaraan bermotor untuk uji berkala;
3. Belum adanya jadwal untuk perawatan alat uji mekanik.

Isu yang dominan : Kurangnya edukasi tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor *over dimensi over load* (ODOL) di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.

Gagasan Pemecahan Isu :

1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Mentor
2. Membuat Design Leaflet Tentang Dampak Negatif ODOL
3. Membuat Design Banner Tentang ODOL
4. Melakukan pembentukan tim dan mengedukasi Secara Langsung Kepada Pemilik Kendaraan Bermotor
5. Melakukan Pengukuran Dimensi Pada Kendaraan Angkutan Barang Bak Terbuka (truk)
6. Melakukan Evaluasi Terkait Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

Tabel 2. Matriks Aktualisasi

NO	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	OUTPUT/HASIL KEGIATAN	NILAI – NILAI DASAR	KONTRIBUSI TERHADAP TUPOKSI UNIT KERJA	PENGUATAN NILAI – NILAI ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengadakan konsultasi dengan mentor dan pihak terkait mengenai pelaksanaan rancangan aktualisasi.	a. Menghadap pimpinan atau mentor di Unit Kerja. b. Menyampaikan dan koordinasi terkait Rancangan Aktualisasi. c. Meminta saran dan masukan untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.	Mendapatkan persetujuan pelaksanaan rancangan aktualisasi dan jadwal kegiatan aktualisasi dapat dimulai.	Keterkaitan dengan Agenda Peran dan Kedudukan ASN adalah pada Mata Pelatihan : 1. Manajemen ASN : Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan atasan terkait kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi ASN. 2. Pelayanan Publik Dengan adanya transparansi antara pegawai dan atasan selaku mentor mampu menciptakan suatu pelayanan yang bermutu. 3. Whole of Government Kegiatan yang dilakukan selalu dilakukan koordinasi dengan kepala UPTD selaku mentor. Keterkaitan Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA): 1. Akuntabilitas : Kejelasan Terdapat kejelasan terhadap jadwal yang telah direncanakan. 2. Nasionalisme : Toleransi Menghargai dan menghormati atasan dalam menyampaikan rancangan aktualisasi.	Tupoksi sesuai dengan Peraturan walikota pagar alam nomor 16 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan dalam melaksanakan pasal 18, tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi : a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotorr.”	Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel, serta nilai pada 5 Citra Manusia Perhubungan “ Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas.”

				<u>3.Etika Publik :</u> Sopan Melakukan komunikasi kepada pimpinan dengan sopan dan santun. <u>4.Komitmen Mutu :</u> Efektif Berorientasi pada hasil/target tujuan yang akan dicapai. <u>5.Anti Korupsi :</u> Jujur Keterbukaan dalam menyampaikan pendapat dan apa adanya.		
2.	Membuat <i>Design leaflet</i> tentang Tentang Dampak Negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> .	a. Membuat draft leaflet. b. Mengajukan draf leaflet ke mentor. c. Mencetak leaflet sesuai dengan konsep.	Leaflet telah disetujui oleh mentor telah dicetak dengan baik sesuai dengan konsep dan diperbanyak	Keterkaitan dengan Agenda Peran dan Kedudukan ASN adalah pada Mata Pelatihan : <u>1. Whole of Government</u> Kegiatan yang dilakukan selalu dilakukan koordinasi dengan mentor. Keterkaitan Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA): <u>1.Akuntabilitas :</u> Kejelasan Terdapat kejelasan terhadap kegiatan yang telah direncanakan <u>2.Nasionalisme :</u> Toleransi Menghargai dan menghormati atasan dalam mengajukan design pembuatan leaflet. <u>3.Etika Publik :</u> Sopan Melakukan komunikasi dengan atasan dengan sopan dan santun.	Tupoksi sesuai dengan Peraturan walikota pagar alam nomor 16 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan dalam melaksanakan pasal 18, tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi : a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotorr."	Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel serta Terwujudnya nilai pada 5 citra manusia perhubungan "Terampil dan berperilaku jujur, gesit, ramah, sopan serta lugas."

				<u>4.Komitmen Mutu :</u> Efisien Mencetak bahan edukasi secara efisien dan efektif <u>5.Anti Korupsi :</u> Jujur Tidak ada manipulasi data dalam kesesuaian jumlah bahan yang dibutuhkan		
3.	Membuat <i>design</i> banner tentang <i>Over Dimensi Over Load</i> .	a. Membuat konsep design banner. b. Mengajukan konsep banner ke mentor. c. Mencetak banner sesuai konsep.	Banner telah disetujui oleh mentor telah dicetak dengan baik sesuai dengan konsep.	Keterkaitan dengan Agenda Peran dan Kedudukan ASN adalah pada Mata Pelatihan : <u>1. Whole of Government</u> Kegiatan yang dilakukan selalu dilakukan koordinasi dengan mentor. Keterkaitan Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA): <u>1.Akuntabilitas :</u> Kejelasan Terdapat kejelasan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan bahan yang dibutuhkan <u>2.Nasionalisme :</u> Toleransi Menghargai dan menghormati atasan dalam mengajukan konsep pembuatan banner. <u>3.Etika Publik :</u> Sopan Melakukan komunikasi dengan atasan dengan sopan dan santun.	Tupoksi sesuai dengan Peraturan walikota pagar alam nomor 16 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan dalam melaksanakan pasal 18, tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi : a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotorr.”	Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel, serta nilai pada 5 Citra Manusia Perhubungan “ Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas.”

				<u>4.Komitmen Mutu :</u> Efisien Mencetak bahan edukasi secara efisien dan efektif <u>5.Anti Korupsi :</u> Jujur Tidak ada manipulasi data dalam kesesuaian jumlah bahan yang dibutuhkan		
4.	Pembentukan tim dan Melakukan Edukasi Tentang Dampak Negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> dan pembagian leaflet serta kuisisioner.	a. Melakukan pemilihan anggota tim. b. Melakukan konsultasi anggota dengan kepala UPTD. c. Menyiapkan leaflet d. Mengedukasi Tentang Dampak Negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> kepada pemilik kendaraan wajib uji. e. Pembagian leaflet dan kuisisioner kepada pemilik kendaraan wajib uji.	Adanya dokumentasi saat melakukan edukasi Tentang Dampak Negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> kepada pemilik kendaraan wajib uji.	Keterkaitan dengan Agenda Peran dan Kedudukan ASN adalah pada Mata Pelatihan : 1. <u>Pelayanan Publik</u> : melaksanakan kewajiban sesuai dengan uraian tugas dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat. 2. <u>Manajemen ASN</u> : Melakukan tugas dengan cermat agar informasi yang diterima akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 3. <u>Whole Of Government</u> : Melakukan koordinasi dengan pemilik kendaraan. Keterkaitan Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA): <u>1.Akuntabilitas :</u> Bertanggung jawab Membagikan leaflet yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas	Tupoksi sesuai dengan Peraturan walikota pagar alam nomor 16 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan dalam melaksanakan pasal 18, tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi : a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotorr.”	Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel, serta nilai pada 5 Citra Manusia Perhubungan “ Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Jasa yang Tertib, Teratur, Tepat Waktu, Bersih dan Nyaman”

				<u>2.Nasionalisme</u> Berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan lainnya. <u>3.Etika Publik:</u> Sopan Santun Dalam pembagian leaflet kepada masyarakat harus dengan sopan dan santun. <u>4.Komitmen Mutu</u> Dalam pemilihan konten harus secara kreatif dan maksud dari konten tersebut tepat dengan sasaran serta penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). <u>5.Anti Korupsi :</u> Taanggung Jawab Kegiatan ini akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras karena merupakan hal baru dalam pemberian edukasi dengan cara turun ke lapangan secara langsung.		
5.	pengukuran dimensi kendaraan bermotor angkutan barang bak terbuka (truk)	a. Melakukan konsultasi anggota dengan kepala UPTD atau Mentor. b. Menyiapkan meteran sebagai alat bantu ukur. c. Melakukan pengukuran sesuai standar.	Adanya dokumentasi saat melakukan pengukuran dimensi kendaraan bermotor angkutan barang bak terbuka.	Keterkaitan dengan Agenda Peran dan Kedudukan ASN adalah pada Mata Pelatihan : 1. <u>Pelayanan Publik</u> : melaksanakan kewajiban sesuai dengan uraian tugas	Tupoksi sesuai dengan Peraturan walikota pagar alam nomor 16 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan dalam	Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel, serta nilai pada 5 Citra Manusia Perhubungan “ Terampil dan berperilaku gesit,

				dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat. 2. <u>Whole Of Government</u> : Melakukan koordinasi dengan mentor di Instansi sebagai salah satu bentuk WoG. 3. <u>Manajemen ASN</u> : Melakukan tugas dengan cermat agar informasi yang diterima akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Keterkaitan Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA): 1. <u>Akuntabilitas</u> : Transparansi : Adanya keterbukaan dalam kerjasama/koordinasi yang saling memberikan dukungan Kejelasan : Adanya kejelasan target dalam melaksanakan kegiatan. Tanggung jawab : Bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengumpulan data, dan pemberian pelayanan 2. <u>Nasionalisme</u> : Sila ke 4 : Adanya musyawarah dan mufakat dalam pelaksanaan koordinasi 3. <u>Etika Publik</u> Menghargai Komunikasi: Menghargai komunikasi dan pendapat dalam koordinasi	melaksanakan pasal 18, tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi : a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotorr.”	ramah, sopan serta lugas.”
--	--	--	--	---	--	-----------------------------------

				Kebersamaan : Dalam melakukan kegiatan dilaksanakan dengan pemikiran yang sama agar mendapatkan hasil yang maksimal 4. <u>Komitmen Mutu</u> Menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan identifikasi dan pengumpulan data untuk perbaikan mutu 5. <u>Anti Korupsi</u> Jujur : Mencatat hasil pengumpulan data sesuai fakta dan tidak berlebihan. Berani : Berani berkoordinasi dan menyampaikan ide atau kegiatan kepada petugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.		
6.	Melakukan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.	a. Melakukan konsultasi dengan kepala UPTD atau Mentor. b. Memeriksa hasil kuisioner Yang telah diisi oleh pemilik kendaraan.	Diperoleh hasil evaluasi kegiatan dari kuisioner yang telah diisi oleh para pemilik kendaran bermotor wajib uji tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan <i>Over Diemnsi Over Load</i> .	Keterkaitan dengan Agenda Peran dan Kedudukan ASN adalah pada Mata Pelatihan : 1. <u>Manajemen ASN</u> : Melakukan tugas dengan cermat agar informasi yang diterima akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.	Tupoksi sesuai dengan Peraturan walikota pagar alam nomor 16 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan dalam melaksanakan pasal 18, tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi : a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang	Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel serta Terwujudnya nilai pada 5 citra manusia perhubungan "Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan."

				Keterkaitan Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA): <u>1. Akuntabilitas</u> Menerima kritik dan saran dengan rasa tanggung jawab. <u>2.Nasionalisme</u> Menghargai pendapat yang diberikan dari rekan kerja <u>3.Etika Publik</u> Bersikap hormat dan sopan pada saat meminta kritik dan saran. <u>4. Komitmen Mutu</u> Menerapkan kritik dan saran dari rekan kerja dengan efektif dan efisien. <u>5.Anti Korupsi</u> Jujur Jujur dalam melaporkan hasil dari evaluasi kegiatan edukasi	pengujian kendaraan bermotor.”	
--	--	--	--	---	---------------------------------------	--

J. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan peserta diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No.	Tahapan Kegiatan	Pekan ke-I	Pekan ke-II	Pekan ke-III	Pekan ke-IV	Pekan ke-V	Output
1.	Mengadakan konsultasi dengan mentor dan pihak terkait mengenai pelaksanaan rancangan aktualisasi.						Arahan mentor dan coach terkait tahapan kegiatan
2.	Membuat <i>design leaflet</i> tentang Tentang Dampak Negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> .						Leaflet yang telah dicetak dan diperbanyak
3.	Membuat banner tentang <i>Over Dimensi Over Load</i> .						Banner yang telah dicetak sesuai dengan arahan mentor
4.	Pembentukan tim dan Melakukan Edukasi Tentang Dampak Negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> dan pembagian leaflet serta kuisisioner.						Hasil kuisisioner yang telah diisi oleh pemilik kendaraan
5.	pengukuran dimensi kendaraan bermotor angkutan barang bak terbuka (Truk).						Hasil pengukuran dimensi kendaraan
6.	Melakukan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.						Seluruh kegiatan terevaluasi

BAB III

PELAKSANAAN AKTUALISASI (HABITUASI)

A. Pendalaman Core Isu Terpilih

Dalam merancang kegiatan aktualisasi, penulis berpedoman kepada isu utama atau *core issue* yang telah terpilih menggunakan instrumen analisis USG (*Urgency, Seriousness, and Growth*). Adapun yang menjadi *core issue* yang menjadi pedoman rancangan aktualisasi dari penulis adalah “Penyusunan Pedoman Kegiatan Perencanaan pada Kantor Camat Lalan Kabupaten Musi Banyuasin”.

Tujuan dari pengambilan isu yaitu untuk mempermudah proses penyusunan kegiatan perencanaan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat waktu dan tepat pula pada sisi realisasi anggarannya, dengan cara implementasi penggunaan buku pedoman penyusunan kegiatan perencanaan Pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di Kantor Camat Lalan.

B. Capaian Kegiatan Aktualisasi

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab peserta Latsar CPNS Kota Pagar Alam, kegiatan yang dilakukan penulis sebagai Penguji pelaksana kendaraan bermotor di UPTD PKB kota Pagar dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN. Terdapat enam kegiatan aktualisasi nilai dasar yang dilakukan di tempat kerja peserta Latsar, sebagai berikut :

1. Mengadakan konsultasi dengan mentor dan pihak terkait mengenai pelaksanaan rancangan aktualisasi.
2. Membuat *Design leaflet* tentang Tentang Dampak Negatif Over Dimensi Over Load.
3. Membuat Design banner tentang Over Dimensi Over Load.
4. Pembentukan tim dan Melakukan Edukasi Tentang Dampak Negatif Over Dimensi Over Load dan pembagian leaflet serta kuisisioner.
5. pengukuran dimensi kendaraan bermotor angkutan barang bak terbuka (Truk).

6. Melakukan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.

kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dari tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 04 Mei 2021. Adapun ringkasan kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan Hasil Aktualisasi

No	Kegiatan	Target	Realisasi Tanggal	% Capaian	Ket
1	Mengadakan konsultasi dengan mentor dan pihak terkait mengenai pelaksanaan rancangan aktualisasi.	Mendapatkan persetujuan dan arahan dalam pelaksanaan aktualisasi	5 April 2021	100 %	Terlaksana
2	Membuat <i>design leaflet</i> tentang Tentang Dampak Negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> .	Mendapat persetujuan mentor terhadap design leaflet dan dapat dicetak sesuai kebutuhan	8 s.d 12 April 2021	100 %	Terlaksana
3	Membuat design banner tentang <i>Over Dimensi Over Load</i>	Mendapat persetujuan mentor terhadap design banner dan dapat dicetak sesuai kebutuhan	8 s.d 12 April 2021	100 %	Terlaksana
4	Pembentukan tim dan Melakukan Edukasi Tentang Dampak Negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> dan pembagian leaflet serta kuisisioner.	Pemilik kendaraan dapat memahami dampak negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> pada kendaraan	13 s.d 27 April 2021	100 %	Terlaksana
5	pengukuran dimensi kendaraan bermotor angkutan barang bak terbuka (truk)	Pemilik kendaraan memahami standar dimensi pada kendaraan	13 s.d 27 April 2021	100 %	Terlaksana
6	Melakukan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.	Dengan adanya edukasi pemilik kendaraan memahami dampak negatif negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> pada kendaraan dan memahami standar dimensi pada kendaraan	28 April 2021	100 %	Terlaksana

Tabel 5. Kegiatan 1

Kegiatan	Mengadakan konsultasi dengan mentor mengenai pelaksanaan kegiatan aktualisasi
Tanggal	5 April 2021
Output	- Foto hasil koordinasi bersama mentor terkait rencana kegiatan habituasi. - Surat permohonan/izin melakukan habituasi.
A. Tahapan Kegiatan 1) Menghadap pimpinan atau mentor di Unit Kerja. 2) Menyampaikan dan koordinasi terkait Rancangan Aktualisasi. 3) Meminta saran dan masukan untuk kegiatan yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. B. Keterkaitan Substansi Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA) Dalam melaksanakan program dalam kegiatan aktualisasi seorang ASN dituntut untuk bekerja secara profesional dengan kesungguhan, penuh tanggung jawab agar mampu menghasilkan hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan capaian tujuan aktualisasi. Dalam kegiatan ini dapat diaktualisasikan kelima nilai dasar profesi ASN. 1) Akuntabilitas : ▪ Kejelasan Terdapat kejelasan terhadap jadwal yang telah direncanakan. 2) Nasionalisme : ▪ Toleransi Menghargai dan menghormati atasan dalam menyampaikan laporan aktualisasi. 3) Etika Publik : ▪ Sopan Melakukan komunikasi kepada pimpinan dengan sopan dan santun. 4) Komitmen Mutu : ▪ Berorientasi Mutu Berorientasi pada hasil/target tujuan yang akan dicapai. 5) Anti Korupsi : ▪ Jujur Keterbukaan dalam menyampaikan pendapat dan apa adanya. C. Keterkaitan Substansi Dengan Peran Dan Kedudukan PNS Dalam NKRI 1) Manajemen ASN : Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan atasan terkait kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi ASN. 2) Pelayanan Publik Dengan adanya transparansi antara pegawai dan atasan selaku mentor mampu menciptakan suatu pelayanan yang bermutu. 3) Whole of Government Kegiatan yang dilakukan selalu dilakukan koordinasi dengan kepala UPTD selaku mentor. D. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor. E. Kontribusi Kegiatan Terhadap Nilai-nilai Organisasi Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel, serta nilai pada Citra Manusia Perhubungan “ Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas.”	

F. Bukti Kegiatan/Dokumentasi



Gambar 3. Konsultasi dengan mentor

Tabel 6 : Kegiatan 2

Kegiatan	Membuat design leaflet tentang dampak negatif <i>over dimensi over load</i>
Tanggal	8-12 April 2021
Output	- Leaflet telah disetujui oleh mentor telah dicetak dengan baik sesuai dengan konsep dan diperbanyak
A. Tahapan Kegiatan 1) Membuat draft leaflet. 2) Mengajukan draf leaflet ke mentor. 3) Mencetak leaflet sesuai dengan konsep. B. Keterkaitan Substansi Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA) Dalam melaksanakan program dalam kegiatan aktualisasi seorang ASN dituntut untuk bekerja secara profesional dengan kesungguhan, penuh tanggung jawab agar mampu menghasilkan hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan capaian tujuan aktualisasi. Dalam kegiatan ini dapat diaktualisasikan kelima nilai dasar profesi ASN. 1) Akuntabilitas : ▪ Kejelasan Terdapat kejelasan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan bahan yang dibutuhkan. 2) Nasionalisme : ▪ Toleransi Menghargai dan menghormati atasan dalam mengajukan design pembuatan leaflet. 3) Etika Publik : ▪ Sopan Melakukan komunikasi dengan atasan dalam hal ini mentor secara sopan dan santun. 4) Komitmen Mutu : ▪ Efisien Mencetak bahan edukasi secara efisien dan efektif.	

5) Anti Korupsi :

▪ **Jujur**

Tidak ada manipulasi data dalam kesesuaian jumlah bahan yang dibutuhkan.

C. Keterkaitan Substansi Dengan Peran Dan Kedudukan PNS Dalam NKRI

1) **Whole of Government**

Kegiatan yang dilakukan selalu dilakukan koordinasi dengan mentor.

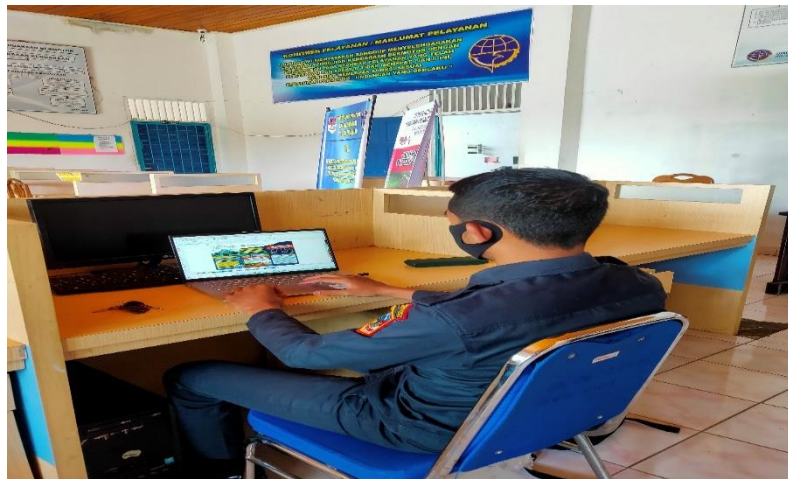
D. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi

Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor.

E. Kontribusi Kegiatan Terhadap Nilai-nilai Organisasi

Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel, serta nilai pada Citra Manusia Perhubungan “ Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas.”

F. Bukti Kegiatan/Dokumentasi



Gambar 4. Membuat Design Leaflet

Tabel 7 : Kegiatan 3

Kegiatan	Membuat <i>design</i> banner tentang sanksi <i>over dimensi over load</i>
Tanggal	8-12 April 2021
Output	- Banner telah disetujui oleh mentor dan dicetak dengan baik sesuai dengan konsep
A. Tahapan Kegiatan 1) Membuat konsep design banner. 2) Mengajukan konsep banner ke mentor. 3) Mencetak banner sesuai konsep. B. Keterkaitan Substansi Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA) Dalam melaksanakan program dalam kegiatan aktualisasi seorang ASN dituntut untuk bekerja secara profesional dengan kesungguhan, penuh tanggung jawab agar mampu menghasilkan hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan capaian tujuan aktualisasi. Dalam kegiatan ini dapat diaktualisasikan kelima nilai dasar profesi ASN. 1) Akuntabilitas : ▪ <u>Kejelasan</u> Terdapat kejelasan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan bahan yang dibutuhkan. 2) Nasionalisme : ▪ <u>Toleransi</u> Menghargai dan menghormati atasan dalam mengajukan design pembuatan banner. 3) Etika Publik : ▪ <u>Sopan</u> Melakukan komunikasi dengan atasan dalam hal ini mentor secara sopan dan santun. 4) Komitmen Mutu : ▪ <u>Efisien</u> Mencetak bahan edukasi secara efisien dan efektif. 5) Anti Korupsi : ▪ <u>Jujur</u> Tidak ada manipulasi data dalam kesesuaian jumlah bahan yang dibutuhkan. C. Keterkaitan Substansi Dengan Peran Dan Kedudukan PNS Dalam NKRI 1) <u>Whole of Government</u> Kegiatan yang dilakukan selalu dilakukan koordinasi dengan mentor. D. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor. E. Kontribusi Kegiatan Terhadap Nilai-nilai Organisasi Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel, serta nilai pada Citra Manusia Perhubungan “ Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas.”	

F. Bukti Kegiatan/Dokumentasi



Gambar 5. Membuat Design Banner

Tabel 8 : Kegiatan 4

Kegiatan	Melaksanakan Edukasi Tentang Dampak Negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> dan pembagian leaflet serta kuisisioner.
Tanggal	13-27 April 2021
Output	- Adanya dokumentasi saat melakukan edukasi ODOL dan pembagian leaflet serta pengisian kuisisioner kepada pemilik kendaraan wajib uji pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pagar Alam.
A. Tahapan Kegiatan 1) Melakukan pemilihan anggota tim. 2) Melakukan konsultasi anggota dengan kepala UPTD. 3) Menyiapkan leafletMenedukasi Tentang Dampak Negatif <i>Over Dimensi Over Load</i> kepada pemilik kendaraan wajib uji. 4) Pembagian leaflet dan kuisisioner kepada pemilik kendaraan wajib uji. B. Keterkaitan Substansi Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA) Dalam melaksanakan program dalam kegiatan aktualisasi seorang ASN dituntut untuk bekerja secara profesional dengan kesungguhan, penuh tanggung jawab agar mampu menghasilkan hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan capaian tujuan aktualisasi. Dalam kegiatan ini dapat diaktualisasikan kelima nilai dasar profesi ASN. 1) Akuntabilitas : ▪ <u>Bertanggung Jawab</u> Membagikan leaflet yang bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas secara menarik akan Dampak Negatif <i>Over Dimensi Over Load</i>. 2) Nasionalisme : Berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan lainnya. 3) Etika Publik : ▪ <u>Sopan santun</u> Dalam penyampaian edukasi dan pembagian leaflet serta kuisisioner kepada masyarakat harus dengan sopan dan santun. 4) Komitmen Mutu : ▪ <u>Efektif</u> Dalam pemilihan konten harus secara kreatif dan maksud dari konten tersebut tepat dengan sasaran serta penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 5) Anti Korupsi : ▪ <u>Kerja Keras</u> Kegiatan ini akan saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras karena merupakan hal baru dalam pemberian edukasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat. C. Keterkaitan Substansi Dengan Peran Dan Kedudukan PNS Dalam NKRI 1) <u>Pelayanan Publik</u> : melaksanakan kewajiban sesuai dengan uraian tugas dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat. 2) <u>Manajemen ASN</u> : Melakukan tugas dengan cermat agar informasi yang diterima akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 3) <u>Whole Of Government</u> : Melakukan koordinasi dengan pemilik kendaraan. D. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor.	

E. Kontribusi Kegiatan Terhadap Nilai-nilai Organisasi

Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel, serta nilai pada Citra Manusia Perhubungan “ Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas.”

F. Bukti Kegiatan/Dokumentasi



Gambar 6. Melakukan Edukasi ODOL dan Pengisian Kuisisioner

Tabel 9 : Kegiatan 5

Kegiatan	Pengukuran dimensi kendaraan bermotor angkutan barang bak terbuka (truk).
Tanggal	13-27 April 2021
Output	- Adanya dokumentasi saat melakukan pengukuran dimensi kendaraan bermotor angkutan barang bak terbuka (truk).
A. Tahapan Kegiatan 1) Melakukan konsultasi anggota dengan kepala UPTD atau Mentor. 2) Menyiapkan meteran sebagai alat bantu ukur. 3) Melakukan pengukuran sesuai standar B. Keterkaitan Substansi Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA) Dalam melaksanakan program dalam kegiatan aktualisasi seorang ASN dituntut untuk bekerja secara profesional dengan kesungguhan, penuh tanggung jawab agar mampu menghasilkan hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan capaian tujuan aktualisasi. Dalam kegiatan ini dapat diaktualisasikan kelima nilai dasar profesi ASN. 1) Akuntabilitas : ▪ <u>Bertanggung Jawab</u> Bertanggung jawab dalam melakukan identifikasi, pengumpulan data, dan pemberian pelayanan 2) Nasionalisme : ▪ <u>Sila Ke-4</u> Adanya musyawarah dan mufakat dalam pelaksanaan koordinasi 3) Etika Publik : ▪ <u>Kebersamaan</u> Dalam melakukan kegiatan dilaksanakan dengan pemikiran yang sama agar mendapatkan hasil yang maksimal 4) Komitmen Mutu : Menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan identifikasi dan pengumpulan data untuk perbaikan mutu. 5) Anti Korupsi : ▪ <u>Jujur</u> Mencatat hasil pengumpulan data sesuai fakta dan tidak berlebihan. C. Keterkaitan Substansi Dengan Peran Dan Kedudukan PNS Dalam NKRI 1) <u>Pelayanan Publik</u> : melaksanakan kewajiban sesuai dengan uraian tugas dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat. 2) <u>Whole Of Government</u> : Melakukan koordinasi dengan mentor di Instansi sebagai salah satu bentuk WoG. 3) <u>Manajemen ASN</u> : Melakukan tugas dengan cermat agar informasi yang diterima akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat D. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor. E. Kontribusi Kegiatan Terhadap Nilai-nilai Organisasi Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel, serta nilai pada Citra Manusia Perhubungan “ Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas.”	

F. Bukti Kegiatan/Dokumentasi

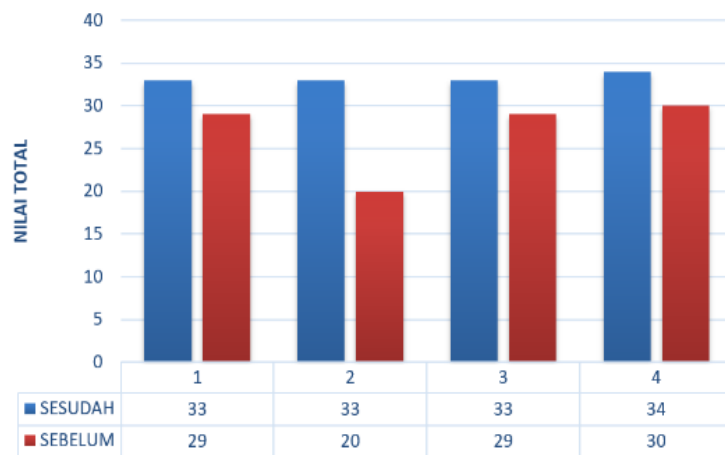


Gambar 7. Melakukan Pengukuran Dimensi
Kendaraan Bak Terbuka (Truk)

Tabel 10 : Kegiatan 6

Kegiatan	Melakukan evaluasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan.
Tanggal	28 April 2021
Output	- Diperoleh hasil evaluasi kegiatan dari kuisioner yang telah diisi oleh para pemilik kendaraan bermotor wajib uji.
A. Tahapan Kegiatan 1) Melakukan konsultasi dengan kepala UPTD atau Mentor. 2) Memeriksa hasil kuisioner Yang telah diisi oleh pemilik kendaraan. B. Keterkaitan Substansi Dengan Nilai Dasar ASN (ANEKA) Dalam melaksanakan program dalam kegiatan aktualisasi seorang ASN dituntut untuk bekerja secara profesional dengan kesungguhan, penuh tanggung jawab agar mampu menghasilkan hasil kerja yang berkualitas sesuai dengan capaian tujuan aktualisasi. Dalam kegiatan ini dapat diaktualisasikan kelima nilai dasar profesi ASN. 1) Akuntabilitas : Menerima kritik dan saran dengan rasa tanggung jawab. 2) Nasionalisme : Menghargai pendapat yang diberikan dari rekan kerja. 3) Etika Publik : Bersikap hormat dan sopan pada saat meminta kritik dan saran. 4) Komitmen Mutu : Menerapkan kritik dan saran dari rekan kerja dengan efektif dan efisien. 5) Anti Korupsi : ▪ Jujur Jujur dalam melaporkan hasil dari evaluasi kegiatan edukasi. C. Keterkaitan Substansi Dengan Peran Dan Kedudukan PNS Dalam NKRI 1) Manajemen ASN : Melakukan tugas dengan cermat agar informasi yang diterima akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. D. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor. E. Kontribusi Kegiatan Terhadap Nilai-nilai Organisasi Terwujudnya pelayanan pengujian yang cepat, tepat dan akuntabel, serta nilai pada Citra Manusia Perhubungan “ Terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas.	

F. Bukti Kegiatan/Dokumentasi



Gambar 8. Melakukan Evaluasi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan aktualisasi kegiatan yang dilakukan penulis di UPTD PKB Kota Pagar Alam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan kegiatan aktualisasi ini, penulis mengangkat isu mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif over dimensi over load.
2. Dari isu tersebut, penulis membuat gagasan pemecahan isu edukasi dampak negatif kendaraan over dimensi over load pada UPTD PKB Kota Pagar Alam.
3. Edukasi dilaksanakan dengan 6 tahapan kegiatan, yaitu dengan melakukan koordinasi dan konsultasi bersama mentor, membuat design leaflet, membuat design banner, melakukan pembagian leaflet , melakukan pengukuran dimensi pada kendaraan bak terbuka (truk), dan terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap keseluruhan tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Dengan adanya edukasi dampak negatif kendaraan over dimensi over, maka kegiatan perencanaan tersusun dengan optimal, efektif, efisiensi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Internal, diharapkan penggunaan leaflet dan banner ini dapat dijadikan panduan dan bahan edukasi pada UPTD PKB Kota Pagar Alam.

2. Eksternal, diharapkan dapat berguna juga bagi lingkungan disekitar, agar dalam penggunaannya tepat guna dan tepat sasaran berdasarkan target unit kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Lembaga Administrasi Negara. 2017. **Aktualisasi**. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. **Akuntabilitas**. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. **Nasionalisme**. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. **Etika Publik**. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. **Komitmen Mutu**. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. **Anti Korupsi**. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. **Pelayanan Publik**. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. **Manajemen ASN**. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai

- Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2017. ***Whole of Government***. Modul Penyelenggaraan Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta; Lembaga Administrasi Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 *tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta; Sekretariat Negara.
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Jakarta; Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 *tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*. Jakarta; Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 *tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor*. Jakarta; Sekretariat Negara.
- Peraturan walikota pagar alam nomor 16 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan.

LAMPIRAN

BIODATA



A. IDENTITAS DIRI

Nama	Dendy Pratama, A.Ma.PKB
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat, tanggal lahir	Pagar Alam, 22 Maret 2000
Kewarganegaraan	Indonesia
Status Perkawinan	Belum Menikah
Tinggi, berat badan	167 cm, 55 kg
Agama	Islam
Alamat Lengkap	Jl. Pratu Bahmin, Kel.Sidorejo, Kec.Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam
Telepon / HP	081367166315
E-mail	Pratamadendy01@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2006 – 2012	SD Negeri 68 Kota Pagar Alam
2012 – 2015	SMP Negeri 01 Kota Pagar Alam
2015 – 2018	SMA Negeri 01 Kota Pagar Alam
2018 – 2020	Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai tidak sesuai dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Palembang, Mei 2021
Penyusun

Dendy Pratama

LEMBAR KONSULTASI COACH

Nama : Dendy Pratama

NIP : 200003222021021001

Judul Aktualisasi : Edukasi Dampak Negatif Kendaraan Bermotor Over Dimensi Over Load Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pagar Alam

No.	Tanggal	Catatan	Tindak Lanjut	Paraf Coach
1.	23 Maret 2021	Konsultasi Judul Rancangan Aktualisasi	• Memperbaiki rancangan judul	
2.	23 Maret 2021	Memperbaiki kaidah penulisan dan bahasa pada BAB I	• Menyesuaikan arahan <i>coach</i> • Memperbaiki latar belakang, tujuan manfaat dan ruang lingkup	
3.	23 Maret 2021	Memperbaiki Rancangan pada Matriks	• Penyusunan tabel, ukuran tulisan	
4.	26 Maret 2021	Memperbaiki laporan aktualisasi BAB III dan BAB IV	• Penyusunan tata letak tabel, dan bukti dokumentasi	
5.	26 April 2021	Konsultasi video laporan aktualisasi	• Durasi video mengikuti petunjuk <i>coach</i>	
6.	07 Mei 2021	Pelaksanaan seminar	• Menyesuaikan arahan <i>coach</i>	

LAMPIRAN KEGIATAN 1

**MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN MENTOR TERKAIT AKTUALISASI
YANG AKAN DILAKUKAN.**

- a. Output Lembar konsultasi
- b. Output Surat Persetujuan dari Mentor
- c. Dokumentasi foto

Perihal : Permohonan Izin
Pelaksanaan Aktualisasi
Dan Habitulasi CPNS

Pagar Alam, 01 April 2021
Kepada Yth.,
Kepala UPTD PKB
Kota. Pagar alam
di
Pagar Alam

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II Angkatan IV Kota Pagar Alam memasuki agenda III (Habitulasi) pada tanggal 01 April 2021 sampai dengan 04 Mei 2021 di instansi CPNS ditempatkan, maka dengan ini :

Nama : Dendy Pratama, A.Ma.PKB
NIP : 200003222021021001
Pangkat/Gol : CPNS / II.b
Jabatan : Penguji Pelaksana

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi dan pengambilan data untuk pendukung penyusunan laporan aktualisasi dengan judul **"Edukasi Dampak Negatif Kendaraan Bermotor Over Dimensi Over Load Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pagar Alam"**.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas izin dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



Dendy Pratama, A.Ma.PKB
NIP. 200003222021021001

Kelengkapan kegiatan 1 menemui mentor untuk berdiskusi terkait aktualisasi mengenai Edukasi dampak negatif kendaraan bermotor ODOL (surat permohonan izin kegiatan aktualisasi)



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Jln. Abdul Wani Senabu Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam



SURAT PERSETUJUAN AKTUALISASI

Nomor : 800/ 49/DISHUB/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI YANTO, S.IP

Nip : 198506202011011005

Pangkat/gol : Penata / III.c

Jabatan : Kasubag TU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama : DENDY PRATAMA

Nip : 200003222021021001

Pangkat/gol : CPNS / II.b

Jabatan : Staff UPTD PKB

Untuk melaksanakan kegiatan Aktualisasi tentang "Edukasi Dampak Negatif Kendaraan Bermotor Over Dimensi Over Load Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pagar Alam"

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagar Alam, 5 April 2021

A.n. KEPALA UPTD PKB
KOTA PAGAR ALAM
KASUBAG TU UPTD



FITRI YANTO, S.IP
Penata (III/c)
NIP. 198506202011011005

Kelengkapan kegiatan 1 menemui mentor untuk berdiskusi terkait aktualisasi mengenai Edukasi dampak negatif kendaraan bermotor ODOL (surat permohonan izin kegiatan aktualisasi)



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Jln. Abdul Wani Senabu Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENTOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI YANTO, S.IP

Nip : 198506202011011005

Jabatan : Kasubag TU UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Instansi : Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam

Mendukung atau menyetujui Rancangan Aktualisasi dari:

Nama : DENDY PRATAMA

Nip : 200003222021021001

Instansi : Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam

Judul : Edukasi dampak negatif Kendaraan bermotor over dimensi over load
pada unit pelaksana teknis daerah pengujian kendaraan bermotor
kota pagar alam

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pagar Alam, 05 April 2021


MENTOR
FITRI YANTO, S.IP
NIP. 198506202011011005

Kelengkapan kegiatan 1 menemui mentor untuk berdiskusi terkait aktualisasi mengenai Edukasi dampak negatif kendaraan bermotor ODOL (surat persetujuan aktualisasi)

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Dendy Pratama

NDH : 37

Judul Aktualisasi : Edukasi Dampak Negatif Kendaraan Bermotor Over Dimensi Over Load Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pagar Alam

Mentor : Fitri Yanto, S.IP

No.	Tanggal	Catatan	Tindak Lanjut	Paraf Mentor
1	5 April 2021	Konsultasi isu yang akan diangkat menjadi laporan aktualisasi, dan surat permohonan izin kegiatan aktualisasi.	Menyesuaikan dengan arahan mentor	
2	8 April 2021	Konsultasi perihal design leaflet dan banner untuk kegiatan sosialisasi.	Menyesuaikan dengan arahan mentor	
3	13 April 2021	Konsultasi pembentukan tim dan daftar pertanyaan kuisioner.	Menyesuaikan dengan arahan mentor	
4	14 April 2021	Konsultasi kegiatan sosialisasi ODOL kepada pemilik kendaraan dan pengukuran dimensi kendaraan bak terbuka (truk).	Menyesuaikan dengan arahan mentor	
5	28 April 2021	Konsultasi Bab III, Bab IV, beserta lampiran laporan aktualisasi.	Menyesuaikan dengan arahan mentor	

Output kegiatan 1 menemui mentor untuk berdiskusi terkait aktualisasi mengenai Edukasi dampak negatif kendaraan bermotor ODOL (lembar konsultasi)



Foto kegiatan 1 menemui mentor untuk berdiskusi terkait aktualisasi mengenai mengenai Edukasi dampak negatif kendaraan bermotor ODOL (5 April 2021).



Foto kegiatan 1 menemui mentor untuk berdiskusi terkait aktualisasi mengenai mengenai Edukasi dampak negatif kendaraan bermotor ODOL (8 April 2021).



Foto kegiatan 1 menemui mentor untuk berdiskusi terkait aktualisasi mengenai mengenai Edukasi dampak negatif kendaraan bermotor ODOL (28 April 2021).

LAMPIRAN KEGIATAN 2

MEMBUAT *DESIGN LEAFLET* TENTANG TENTANG DAMPAK NEGATIF *OVER DIMENSI OVER LOAD*.

- a. Dokumentasi foto
- b. Output Leaflet



Foto kegiatan 2 membuat design Leflet.



Foto kegiatan 2 Output Leaflet.

LAMPIRAN KEGIATAN 3

MEMBUAT BANNER TENTANG *OVER DIMENSI OVER LOAD*.

- a. Dokumentasi foto
- b. Output Banner



Foto kegiatan 3 membuat design Banner.

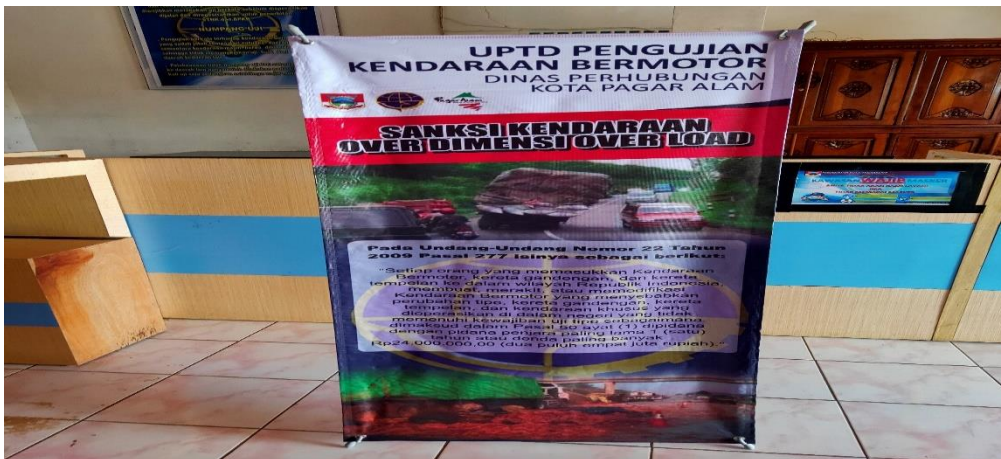


Foto kegiatan 3 Output Banner

LAMPIRAN KEGIATAN 4

PEMBENTUKAN TIM DAN MELAKUKAN EDUKASI TENTANG DAMPAK NEGATIF *OVER DIMENSI OVER LOAD* DAN PEMBAGIAN LEAFLET SERTA KUISIONER.

- a. Output Anggota tim
- b. Dokumentasi foto

DAFTAR ANGGOTA TIM SOSIALISASI DAN PENGUKURAN DIMENSI

NAMA	JABATAN	PARAF
Dendy Pratama	Staff UPTD PKB	
Adhitya Sandika	Tenaga Teknis UPTD PKB	
Jhon Apriansyah Putra	Tenaga Teknis UPTD PKB	
Ari Noviansyah	Tenaga Teknis UPTD PKB	
Jumartono	Tenaga Teknis UPTD PKB	

Pagar Alam, 15 April 2021
Yang Menyatakan


FITRI YANTO, S.IP
NIP.198506202011011005

Output kegiatan 4 Daftar anggota tim sosialisasi dan pengukuran dimensi



Foto kegiatan 4 Mengedukasi pemilik kendaraan bermotor

LAMPIRAN KEGIATAN 5

PENGUKURAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG BAK TERBUKA (TRUK)

- a. Output hasil pengukuran
- b. Dokumentasi foto



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Jl. Wedana Abdul Wani Senabu Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara

SURAT PERINTAH UJI KENDARAAN
(SPUK)

Hari Tanggal :		B. DIMENSI BAK MUATAN		C. DIMENSI BAK MUATAN	
A. PEMERIKSAAN IDENTITAS		Jarak Sumbu : mm		Panjang : mm	
Nama / Alamat : BENNY FAHMAN		Panjang Total : mm		Lebar : mm	
Pemilik Kendaraan : SUDARSO RT. I. EW. 008/003		Lebar Total : mm		Tinggi : mm	
No. Kendaraan : 66. 8721. 070. 980		Tinggi Total : mm		Volume : mm	
No. Uji Kendaraan : AF. 011. 070. 980		ROH : mm		D. KONFIGURASI SUMBU :	
No. Rangka : MUMPERA 19.0205.589		FOH : mm		E. UKURAN BAN :	
No. Chasis :		JT : mm		 mm	
Merek / Type / Tahun : MITSUBISHI		q : mm		 mm	
Kendaraan :		p : mm		 mm	
Jenis / CC Kendaraan :		b : mm		 mm	
Karoseri / ATPM :		r : mm		 mm	
Bahan : kayu		CATATAN		Penguji	
F. PEMERIKSAAN VISUAL I		Tinggi Berlebih batas 700 mm di atas lubang, panjang lebih 400 mm		DENDY PRATAMA, A.Ma PKB	
Body Kendaraan :				Penguji	
Roda dan Ban :					
Sistem Penerangan :					
Perlengkapan :					
Jumlah Tempat Duduk :					
G. PENGUJIAN AMBANG BATAS		HASIL UJI		AMBANG BATAS	
1 SMOKE TESTER		CO = %		CO = 4.5 %	
2 SPEEDOMETER		HC = ppm		HC = 1200 ppm	
3 KLAKSON		Ketebalan Asap = %		Ketebalan Asap = 50 %	
4 HEAD LIGHT TESTER		= %		-10 % s/d +15 %	
Kuat Cahaya		cdl		1200 cdl	
Penyimpangan Kiri		0°34		DENDY PRATAMA, A.Ma PKB	
Penyimpangan Kanan		1°09		Penguji	
5 SIDE SLIP TESTER		IN = mm/M		+5 mm/M	
AXLE LOAD METER		OUT = mm/M		-5 mm/M	
Sumbu I		 Kg		 Kg	
Sumbu II		 Kg		 Kg	
Sumbu III		 Kg		 Kg	
Sumbu IV		 Kg		 Kg	
Jumlah		 Kg		DENDY PRATAMA, A.Ma PKB	
7 BRAKE TESTER		Rem Utama		Rem Parkir	
Kanan		Kiri		Kanan	
S1		Kg		Kg	
S2		Kg		Kg	
S3		Kg		Kg	
S4		Kg		Kg	
H. PEMERIKSAAN II		CATATAN		Penguji	
Rangka Landasan					
Motor Penggerak					
Penerus Daya					
AS dan Suspensi					
Sistem Kemudi					
Sistem Rem					
Sistem Kelistrikan					
Sistem Pembuangan				DENDY PRATAMA, A.Ma PKB	

Nama Pemilik / Kuasa

[Signature]

(Kera Aprianyan)

Pagar Alam, 27 April 2021
Kordinator Penguji

[Signature]

FITRIO EDWIN, A.Ma PKB
No.Reg. 016.072.PT2.01.001
Nip. 199005292016121001

Foto kegiatan 5 Hasil pengukuran dimensi



Foto kegiatan 5 Pengukuran dimensi

LAMPIRAN KEGIATAN 6

MELAKUKAN EVALUASI TERKAIT KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN.

- a. Dokumentasi foto
- b. Output Hasil evaluasi



Foto kegiatan 6 melakukan pemeriksaan kuisisioner.

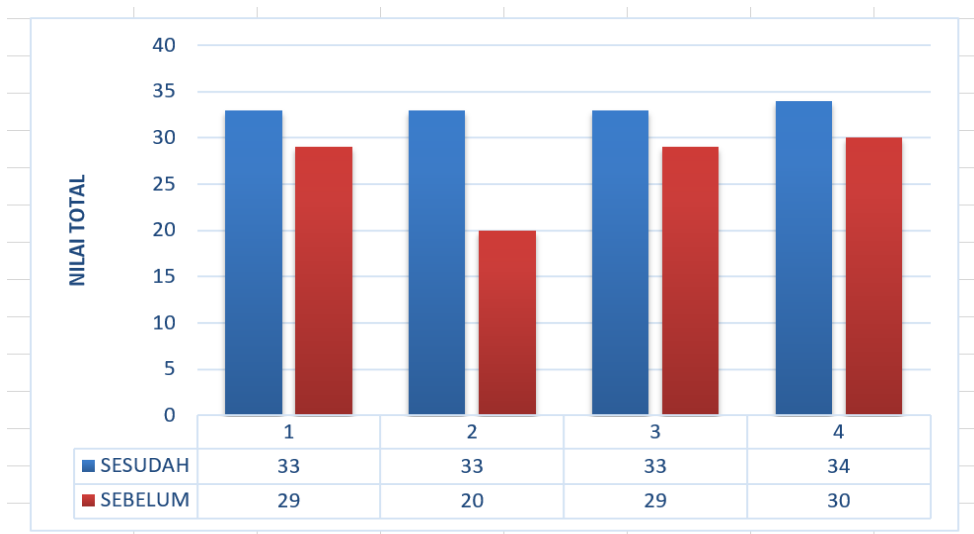


Foto kegiatan 6 hasil evaluasi